

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2008-2016
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**NOVITA SARI
NPM: 1451010223**

Program Studi :Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Prof. Dr. TulusSuryanto, M,M., Akt, CA

Pembimbing II: M. Kurniawan, SE.,M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengelola anggaran keuangan diberikan kewenangan penuh dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan beberapa sumber penerimaan dari APBD, begitu pula dengan belanja modal merupakan salah satu bagian belanja atau pengeluaran dalam APBD. Adanya Dana Perimbangan dan PAD menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk sebaik mungkin dalam menggunakan dan merealisasikan dana tersebut lewat pembangunan yang bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat di daerah sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah Pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, DBH dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2008-2016 secara parsial maupun simultan, serta bagaimana ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK DBH, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja modal Kabupaten Lampung Selatan dan mengetahui apabila ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam periode pengamatan 2008-2016. Data yang digunakan adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK, Pendapatan Asli Daerah, dan belanja modal. Data yang terkumpul di analisis menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan program SPSS 2018.

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara simultan Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, DBH dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara parsial Dana Perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan DBH berpengaruh negatif dan signifikan hal ini dikarenakan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam, dan dana bagi hasil pajak relatif kecil. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, karena alokasi dari PAD hanya sebagian yang dialokasikan kebelanja modal dan sisanya digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya. Prinsip islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual. Dalam menentukan anggaran suatu daerah, sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja daerah termasuk belanja modal. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas maupun fasilitas publik yang merupakan tujuan dari syariat islam untuk mencapai kemaslahatan bersama serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmih, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarami, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA MODAL KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN 2008-2016 DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Nama Mahasiswa

Novita Sari

NPM

1451010223

Program Studi

Ekonomi Syariah

Fakultas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A

M. Kurniawan, SE., M.E.Sy

NIP. 197009262008011008

NIP. 198605172015031005

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.Si

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat: Jl. Letkol. H. Endero Suratmih, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarama, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2008-2016 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**, disusun oleh: **Novita Sari, NPM: 1451010223, Jurusan: Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 08 Oktober 2018.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua: **Budimansyah, M.Kom.I**

Sekretaris: **Diah Mukminatul M.E.Sy**

Penguji I: **A. Zuliansyah, S.Si, M.M**

Penguji II: **Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Al- Jumuah: 10)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.442

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penulis. Sholawat beriringan salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW. Dari hati penulis yang paling dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tersayang, Ayahanda Niko Dimus dan Ibunda Siti Rofiah yang sangat Saya hormati dan Saya banggakan. Yang tak pernah berhenti mendoakan dan mendukungku untuk mengejar cita-cita, dan senantiasa memberikan kesabaran dan kasih sayang yang tulus, terima kasih banyak.
2. Adikku Amanda Luciana dan keluarga besar, yang selalu menyemangati baik dalam keadaan susah maupun senang dan memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah tempat penulis menuntut ilmu.
4. Seluruh sahabat seperjuangan yang telah mendampingi selama empat tahun, Rahma Noviyani, Eka Susiatun, Etika Dewi Puja Lestari, Desi Yanti, Dedeh Suryani, Siti Hayati, Juniarsih, terima kasih atas rasa persaudaraan dan canda tawa yang kalian berikan di koridor jurusan Pendidikan Ekonomi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Novita Sari, dilahirkan di Bumi Dipasena Makmur pada tanggal 10 September 1994. Penulis merupakan anak Pertama dari pasangan ayahanda Niko Dimus dan ibunda Siti Rofiah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu SD Negeri 1 Bumi Dipasena Makmur pada tahun 2007, lalu melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Rawa Jitu Timur pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan pendidikan ke SMK YP Bakauheni dan selesai pada tahun 2013.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UMPTAIN) pada tahun 2014 . Selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, penulis pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan rangkaian tugas akhir, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamarga, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan limpahan rahmat – Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2016** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, dan tanpa bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

2. Madnasir, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Deki Firmansyah, M.Si selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syari'ah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Prof.Dr.Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,CA dan M.Kurniawan, S.E.,M.E.Sy yang merupakan pembimbing I dan II yang telah tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
6. Sahabat seperjuangan khususnya kelas A Jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2014, yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan semangat dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis Rahma NoviYani, Eka Susiatun, dan Etika Dewi Puja Lestari, Atika Rahmawati, temen temen seperjuangan Dedeh Suryani, Siti Hayati, Juniarsih, temen-temen KKN Balqis Jauza Adisya, Temen kosan

First Stela, Selvira, Mba Adel, Mba Kiki, dan Mba Tonah-tonah dan lainnya terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu keislaman di abad modern.



Bandar Lampung, 11 Agustus 2018

Penulis

Novita Sari

NPM. 1451010223

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	4
D. Batasan Masalah	14
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Teori.....	18
1. Pengertian Teori Keagenan	18
B. Anggaran.....	19
1. Pengertian Anggaran.....	19
2. Dasar Hukum Anggaran.....	19
3. Anggaran Daerah	21
C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	22
1. Pengertian APBD	22

D. Dana Perimbangan	24
1. Pengertian Dana Perimbangan	24
2. Dana Bagi Hasil (DBH)	25
3. Dana Alokasi Umum (DAU)	27
4. Tahap Perhitungan DAU dan Formulasi DAU	29
5. Dana Alokasi Khusus (DAK)	32
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	39
F. Alokasi Belanja Daerah	41
1. Jenis-Jenis Belanja	42
G. Belanja Modal	46
1. Pengertian Belanja Modal	46
2. Jenis-Jenis Belanja Modal	47
H. Ekonomi Islam	49
1. Pengertian Ekonomi Islam	49
2. Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Islam	53
3. Pendapatan/Penerimaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	54
4. Pengeluaran/Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Islam	61
I. Telaah Pustaka	64
J. Kerangka Berfikir	66
K. Hipotesis	67

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	76
1. Jenis Penelitian	76
2. Sifat Penelitian	76
B. Jenis dan Sumber Data	77
1. Jenis Data	77
2. Sumber Data	77
C. Metode Pengumpulan Data	78

D. Populasi dan Sampel.....	79
1. Populasi	79
2. Sampel.....	79
E. Definisi Operasional Penelitian.....	79
1. Variabel Dependen (Y)	80
2. Variabel Independen (X).....	80
F. Teknik Analisis Data.....	83
1. Uji Asumsi Klasik.....	83
2. Uji Multikolinieritas.....	84
3. Uji Autokorelasi	85
4. Uji Heteroskedastisitas	85
5. Uji Hipotesis	85
6. Koefisien Determinasi.....	86
7. Uji Regresi Linier Berganda.....	87
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	89
1. Sejarah Kabupaten Lampung Selatan	89
2. Luas Wilayah dan Letak Geografis.....	91
3. Batas Wilayah	92
B. Gambaran Hasil Penelitian.....	93
1. Dana Alokasi Umum Di Kabupaten Lampung Selatan	93
2. Dana Alokasi Khusus Di Kabupaten Lampung Selatan	94
3. Dana Bagi Hasil Di Kabupaten Lampung Selatan	95
4. Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan	97
5. Belanja Modal Di Kabupaten Lampung Selatan	98
C. Analisis Data.....	100
1. Uji Asumsi Klasik.....	100
D. Hasil Penelitian.....	103
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	103
2. Uji Koefisien Determinasi.....	105
3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	106
4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)	106

E. Pembahasan.....108

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan Secara Parsial 108
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan Secara Simultan..... 120
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam 121

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....129
- B. Saran131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Lampung Selatan (miliar rupiah), 2008-2016.....	6
Tabel 1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (miliar rupiah)	8
Tabel 1.3	Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (miliar rupiah)	9
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	95
Tabel 4.1	Penerimaan DAU Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)	107
Tabel 4.2	Penerimaan DAK Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)	108
Tabel 4.3	Penerimaan DBH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)	109
Tabel 4.4	Penerimaan PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (miliar rupiah).....	111
Tabel 4.5	Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (Miliar Rupiah)	113
Tabel 4.6	Uji Normalitas	113
Tabel 4.7	Uji Multikolineritas	115
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi	116
Tabel 4.9	Ringkasan Uji Regresi Berganda.....	117
Tabel 4.10	Penerimaan DAU Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)	123

Tabel 4.11	Penerimaan DAK Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)	126
Tabel 4.12	Penerimaan DBH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)	129
Tabel 4.13	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (dalam miliar rupiah).....	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	82
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	115



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Nomor06 tahun 2018 tentang penunjukan dosen pembimbing skripsi mahasiswa semester genap tahun akademik 2017/2018
- Lampiran 4 :Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan (miliar rupiah), 2009-2012
- Lampiran 5 : Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan (miliar rupiah), 2009-2012
- Lampiran 6 : Realisasi penerimaan Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan (miliar rupiah), 2011-2015
- Lampiran 7 : Realisasi pengeluaran daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan (miliar rupiah), 2011-2015
- Lampiran 8 : Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2015-2016
- Lampiran 9 : Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2015-2016
- Lampiran 10 : Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 11 : Hasil Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 12 : Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 13 : Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 14 : Hasil Uji Analisis Linier Berganda
- Lampiran15 : Koefisien Determinasi
- Lampiran 16 : Uji T
- Lampiran 17 : Uji F

Lampiran 18 : Berita Acara Munaqasyah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran utama pada suatu penelitian karya ilmiah, sehingga penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian. Oleh karena itu perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi “PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2008-2016 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membantu pembiayaan kegiatan daerah, serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah.²

¹Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Modern English Pers Jakarta, 1999), h156.

² Ardiansyah Putra, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatra Utara*, (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen, Vol.3 No.1 November 2016), h.15.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.³

4. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

Berdasarkan penegasan dari istilah judul penelitian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud oleh judul ini secara keseluruhan adalah skripsi “PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2008-2016 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

³Deddy Supriyady Barat Kusumah dan Dadang Salihin, *Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001), h.173.

⁴ Andreas Marzel Palealu, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*, (Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013), h.91.

⁵P3EI, *Ekonomi Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), h.19.

1. Alasan Objektif

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Peningkatan PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dari pemerintah ini yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan

tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal. Masalah riil yang terjadi yaitu masih banyaknya jalan raya yang berlubang, selain itu masih banyak masalah lain yang perlu diperhatikan.

2. Alasan Subjektif

- a. Bahasan di dalam skripsi ini sesuai dengan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu juga dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.
- b. Bidang referensi yang mendukung, sehingga dapat mempermudah penelitian dalam menyelesaikan skripsi tersebut.
- c. Sesuai dengan jurusan, penulis dengan meneliti pengaruh dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016 dalam perspektif ekonomi islam dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai pembangunan ekonomi.

C. Latar Belakang Masalah

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia, merupakan wujud diberlakukannya desentralisasi fiskal. Otonomi Daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah sendiri diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁶

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat utama. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota.⁷

Di dalam pasal 1 Ayat (17) UU No.33 Tahun 2004 APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan

⁶ Imam Soebachi, *Judical Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.134-135.

⁷ Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011), h.2.

ditetapkan dengan peraturan daerah. Ada tiga komponen di dalam APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Apabila ketiga komponen ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan. UU No 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini adalah data realisasi penerimaan Dana Perimbangan di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2008 sampai 2016 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Tabel 1.1
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Lampung Selatan (miliar
rupiah), 2008-2016

No.	Tahun	DAU	DAK	DBH
1	2008	658,04	77,82	70,70
2	2009	444,67	77,31	41,94
3	2010	505,87	71,31	52,82
4	2011	574,12	75,44	50,81

5	2012	686,43	115,55	55,50
6	2013	769,87	77,18	53,84
7	2014	847,66	96,47	49,2
8	2015	881,98	108,84	33,77
9	2016	1031,44	307,02	33,96

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan⁸

Pada Tabel 1 dapat dilihat, dari tahun 2008 hingga 2016 penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil di Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN, kemudian disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Fungsi Dana Alokasi Umum Adalah sebagai alat pemerataan kapasitas fiskal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana dari pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan

⁸ BPS Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung*, (BPS Provinsi Lampung: 2016)

memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Pemnafaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang dan tidak termasuk penyertaan modal.

Selain dana perimbangan, sumber pendapatan daerah di dalam APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.⁹

Berikut merupakan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2008-2016 di Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2008-2016 (miliar rupiah)

Tahun	PAD
2008	25,10
2009	25,03
2010	40,75
2011	68,65
2012	80,46
2013	100,05
2014	132,17
2015	161,65
2016	184,06

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

⁹Desak Gede Yudi Atika Sari, dkk, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Dana Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali*, (Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol.9 No.1 Juli 2017), h.16-17

Dari tabel di atas dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2008-2016 mengalami peningkatan. Peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik. Dalam masa desentralisasi seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana daerah melalui alokasi belanja modal di dalam APBD. Semakin baik PAD di suatu daerah diharapkan akan mampu meningkatkan alokasi belanja modalnya.¹⁰

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik.¹¹ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.¹² Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksananya berbagai

¹⁰ Arbie Gugus Wandira, *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, (Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang, Februari 2013), h.45.

¹¹ Desak Gede Yudi Atika Sari, *Op.Cit*, h.16.

¹² Diah Nurdiwaty, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli 2017), h.49.

aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut merupakan tabel realisasi anggaran belanja modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016:

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (miliar rupiah)

Tahun	Belanja Modal
2008	142,95
2009	119,69
2010	79,40
2011	114,53
2012	275,42
2013	225,13
2014	206,06
2015	342,44
2016	470,12

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

Dari tabel di atas dapat diketahui Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2008-2016 berfluktuatif. Pengalokasian belanja modal trendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 79,40 miliar rupiah. Peningkatan belanja modal tidak diimbangi dengan banyaknya pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan banyaknya penerimaan tidak semua digunakan untuk membiayai belanja modal namun ada sebagian yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut tabel yang menunjukkan realisasi pengeluaran atau belanja langsung di Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 4.13
Realisasi Pengeluaran Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 – 2016 (miliar rupiah)

Tahun	BM	BP	BBJ
2009	119,690	396,418	54,183
2010	79,402	478,714	72,761

2011	141,534	553,247	152,613
2012	275,416	573,426	162,880
2013	225,13	683,10	163,78
2014	206,06	760,60	214,90
2015	342,44	850,69	215,75
2016	470,122	891,302	260,176

Sumber: BPS Lampung Selatan

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BP = Belanja Pegawai

BBJ = Belanja Barang dan Jasa

Dari data diatas dapat dilihat bahwa belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.¹³ Selain itu belanja modal sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Negara yang dijalankan dengan prinsip islami pada hakikatnya memiliki tujuan besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seluruh masyarakatnya, memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun

¹³Desak Gede Yudi Atika Sari, *Op.Cit*, h.16.

antara anggota masyarakat, dan menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua tujuan itu harus dijalankan dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah.

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal, pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, *amar makruf nahi munkar*, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.¹⁴

Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tertuang dalam QS Al-Hasr (59) : 7 berikut ini:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁴Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islami, (Jakarta; KENCANA, 2016), hlm.73

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2010), h.546

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja melainkan kekayaan didistribusikan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.”

Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.¹⁶

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan barang publik, karena hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan *treatment* terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara.¹⁷

Anggaran modern merupakan suatu campuran antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun menghilangkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi. Di

¹⁶*Ibid*, hlm. 65

¹⁷*Ibid*, hlm. 76

dalam negara islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam penanganan defisit anggaran. Negara islam dewasa ini harus memulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Oleh karena itu, di dalam islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja tahunan, sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara islam mempunyai anggaran belanja tetap yang babnya sudah ditentukan oleh *syara'* mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.

Pada masa islami dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan pokok pendapatan, jelaslah di zaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara islam. Diperlukan adanya pengenaan pajak barum terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan hal ini: “selalu ada yang harus dibayar selain zakat.” Maka Rasullullah SAW berpesan ”Kekayaan Harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin.”(HR. Bukhari)¹⁸Selain pajak penerimaan seperti dana transfer juga dapat membantu menambah pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH DAN PERIMBANGAN DAN**

¹⁸*Ibid*, hlm. 238

**PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2008-2016 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.”**

D. Batasan Masalah

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus. Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penghasilan mandiri daerah. Belanja modal merupakan salah satu belanja yang terdapat di dalam APBD dan termasuk ke dalam jenis belanja langsung. Untuk itu di dalam skripsi ini saya akan membahas mengenai penerimaan daerah yang terdapat di dalam APBD yaitu Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) di Kabupaten Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Adakah pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016?
2. Adakah pengaruh Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016?

3. Bagaimanakah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal menurut perspektif ekonomi islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Dana dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016.
- c. Untuk mengetahui Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di pandang dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Bagi akademik, memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan di bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016 dalam perpektif ekonomi islam.
 - 2) Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja modal

Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016 dalam perspektif ekonomi islam.

b. Secara Praktis

1) Bagi pemerintah, dapat dijadikan rekomendasi agar dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk melakukan pengembangan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Karena apabila dikembangkan dengan maksimal akan menghasilkan dan menambah penghasilan seperti Pendapatan Asli Daerah. Sehingga menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang mandiri. Selain itu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana/prasarana yang ada agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan.

2) Bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat memberikan wawasan untuk dijadikan pertimbangan dalam melihat peluang usaha ataupun pengembangan usaha yang dapat menambah pendapatan melalui kegiatan usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan

1. Pengertian Teori Keagenan

Teori yang menjelaskan hubungan *principal* dan *agent* ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori *principal-agent* menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit atau eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*.¹

Menurut Purwati, “Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* sebagai pihak pertama dengan *agent* sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak *principal* merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut, sedangkan pihak *agent* bertugas menerima dan menjalankan kontrak sesuai dengan keinginan pihak *principal*”.

Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu penggunaan

¹Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: 2011), h.14.

dana hibah dari pemerintah pusat harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Rakyat dalam hal ini sebagai *principal* memiliki DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Disitulah peran teori agensi dalam menjelaskan hubungan keagenan pada penganggaran sektor publik.²

B. Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan instrument ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.³

2. Dasar Hukum Anggaran

Dasar hukum tertinggi pelaksanaan anggaran belanja negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai

²Winda Putri Lestari, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol6 No.6 Juni 2017), h.3.

³Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 88

belanja negara pada hakikatnya secara komprehensif dimulai dari pasal 4 UUD 1945. Dalam Pasal 4 disebutkan:⁴

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Berdasarkan pasal ini presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maka dengan demikian presiden mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal penting dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah adanya pemisahan kekuasaan antara dua lembaga sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi (*check and balance*). Pemisahan kekuasaan tersebut adalah prinsip-prinsip yang baik menurut teori hukum administrasi negara. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dilakukan oleh badan legislatif, khusus dalam kebijakan menetapkan anggaran negara yang dikenal dengan istilah hak *budget*. Sementara itu, kekuasaan pelaksanaan di bidang keuangan negara yang berada di tangan lembaga eksekutif dikenal dengan kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Dalam

⁴Undang – Undang Dasar 1945 di akses pada www.mahkamahkonstitusi.go.id tanggal 10 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB

pelaksanaan kekuasaan umum tetap mempertahankan mekanisme saling mengawasi, dengan adanya pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan negara, dan kekuasaan untuk memutuskan pelaksanaan pembayaran.⁵

3. Anggaran Daerah

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sebuah anggaran yang baik akan mencerminkan efektivitas kinerja pemerintah di mata publik, maka pemerintah harus benar-benar dapat membuat anggaran yang matang dan realistis untuk direalisasikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Menurut Mardiasmo, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran publik memiliki karakteristik berbeda dengan penganggaran dalam bisnis.

Menurut Lee dan Jhonson (1998) karakteristik tersebut mencakup ketersediaan sumber daya, motif laba, barang publik, eksternalitas, penentuan

⁵ Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR – RI mengenai RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Rapat Paripurna DPR RI 29 Januari 2001, Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2008)

harga pelayanan publik, dan pembedaan lain seperti intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut mahmudi anggaran sektor publik adalah *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Sedangkan menurut Indra Bastian anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.⁶

Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik.

C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁷ Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Di dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah BAB III Pasal 20 bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

⁶Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*

⁷Rakhmawati Listyarani, *Analisis Incrementalisme Anggaran Terhadap Revisi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Tesis Magister Ilmu Akuntansi, Lampung. Tahun 2016), h.11.

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- b. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan jenis belanja adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.
- c. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman, dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

D. Dana Perimbangan

1. Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁹ Selain itu Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

⁸Diah Nurdiwaty, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017), h.47-48.

⁹ BPS Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung*, h.6.

Pusat dan Daerah BAB II Pasal 2 Ayat 3 Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).¹⁰

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan dana perimbangan dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiwaty. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sehingga dalam hal ini berarti jika dana perimbangan mengalami kenaikan maka pengalokasian anggaran belanja modal meningkat.¹¹

Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya diatasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan yang ada di daerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan.

¹⁰ Diah Nurdiwaty, dkk, *Op.Cit*, h.50.

¹¹ Diah Nurdiwaty, *Op.Cit*.

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak.¹²

DBH merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.¹³ Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 23 Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Salah satu daerah di Kabupaten Lampung Selatan yang mendapat alokasi DBH adalah Kecamatan Jati Agung ± sebesar 71,55 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu tujuan peningkatan DBH tersebut adalah untuk perbaikan infrastruktur jalan, dikutip dari Tribun Lampung.

“TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JATI AGUNG - Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengatakan, untuk tahun 2018 ini alokasi anggaran yang akan dikucurkan ke Wilayah Kecamatan Jati Agung

¹²Arbie Gugus Wandira, *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, (*Accounting Analysis Jurnal*, Februari 2013), h.45-46.

¹³Arbie Gugus Wandira, *Op.Cit*, h.46.

sebesar Rp 71,55 miliar lebih. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya Rp 48 miliar.

“Tahun ini total alokasi anggaran yang digelontorkan untuk Kecamatan Jati Agung meningkat. Salah satu fokusnya yakni untuk perbaikan infrastruktur jalan,” ujarnya saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Jati Agung, Rabu, 7 Februari 2018.”¹⁴

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.¹⁵ Adapun pengalokasian DAU antara lain:

- a. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Besaran DAU ditetapkan sekurang-sekurangnya 26% dari total Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBD.
- c. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota.¹⁶

¹⁴Lampung.tribunnews.com/2018/02/07/tahun-ini-jati-agung-kebagian-alokasi-rp-7155-miliar, diunduh pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.00

¹⁵BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.7.

¹⁶www.djpk.depkeu.go.id, diunduh pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.00

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.¹⁷

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Dengan adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai. Dikutip dari metrotvnews.com:

¹⁷Puput Purpitasari, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.11 Tahun 2015), h.6

“Metrotvnews.com, Lampung: Alokasi dana untuk Program “Satu Desa Satu Miliar” di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tahun ini mencapai Rp30,4 miliar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Minhairin mengatakan kucuran dana untuk desa itu berasal dari anggaran peralihan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai.

“Anggaran DAU-nya memang tidak berkurang, tapi dari segi peningkatan anggaran setiap tahunnya yang berkurang. Mungkin, dana untuk desa itu diambil dari sana,” ujar dia di Kalianda, Lampung, Selasa (17/2/2015).”¹⁸

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa dan merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Tujuan dari ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu ADD ini ditujukan pula supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

4. Tahap Perhitungan DAU dan Formulasi DAU

Ada empat tahapan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) antara lain:

a. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan

¹⁸Ekonomi.metrotvnews.com/mikro/9K5YRwaK-dana-desa-kabupaten-lampung-selatan-capai-rp30-4-miliar, diunduh pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.00

untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

b. Tahap Administratif

Dalam tahapan ini Kemenkeu c.q DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

c. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

d. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan panitia belanja daerah, panitia anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

Sedangkan formulasi Dana Alokasi Umum antara lain:

- a. Formula DAU menggunakan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) Berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus Formula DAU:

DAU-Alokasi Dasar (AD)-Celah Fiskal (CF)

Keterangan:

AD: Gaji PNS daerah

CF: Kebutuhan fiskal-kapasitas fiskal

b. Variabel DAU

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

c. Metode Perhitungan DAU

1) Alokasi Dasar

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realiasi gaji pegawai negeri sipil daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

2) Celah Fiskal

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan

alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara Kbf dengan KcF.¹⁹

Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya di dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

¹⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *Loc. Cit*

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah ditentukan.²⁰

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.²¹

Di Indonesia kebijakan pengalokasian DAK mulai diimplementasikan sejak tahun 2003. Pada tahun tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana pemerintah. Dari tahun ketahun pengalokasian DAK mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai DAK, serta jumlah daerah penerima.

Seiring dengan adanya pemekaran kabupaten/kota, maka jumlah kabupaten maupun kota yang menerima alokasi DAK terus meningkat. Bila pada tahun 2003 hanya terdapat 265 kabupaten yang menerima alokasi DAK kabupaten, maka pada tahun 2010 terdapat 398 kabupaten yang menerima alokasi DAK, yang berarti selama kurun waktu tersebut jumlah kabupaten yang menerima alokasi DAK meningkat 50%.

²⁰BPS Provinsi Lampung, *Loc.Cit*, h.7.

²¹Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), h.126.

Demikian juga dengan jumlah kota yang menerima alokasi DAK, bila pada awalnya hanya terdapat 65 kota yang menerima alokasi DAK, maka pada tahun 2010 terdapat 93 kota yang menerima alokasi DAK. Selama kurun waktu antara tahun 2003 hingga 2010 jumlah kota yang menerima alokasi DAK mengalami peningkatan 50%.²²

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus didistribusikan ke dalam semua bidang yang terdiri dari:

a. DAK bidang perikanan dan kelautan

Dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi serta penyediaan sarpras terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

b. DAK bidang pertanian

Dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan, dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

c. DAK bidang keluarga berencana

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.

d. DAK bidang kehutanan

²²Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus*, (Jakarta).

Dialokasikan peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

e. DAK bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013.

f. DAK bidang sarana perdagangan

Dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung 1) pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan pemekaran atau daerah yang minim sarana perdagangannya dan 2) pelaksanaannya tertib untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam jaminan kebenaran hasil pelaporan terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi ukur (akar timbang dan perlengkapan-perengkapannya UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani.

g. DAK bidang energi pedesaan

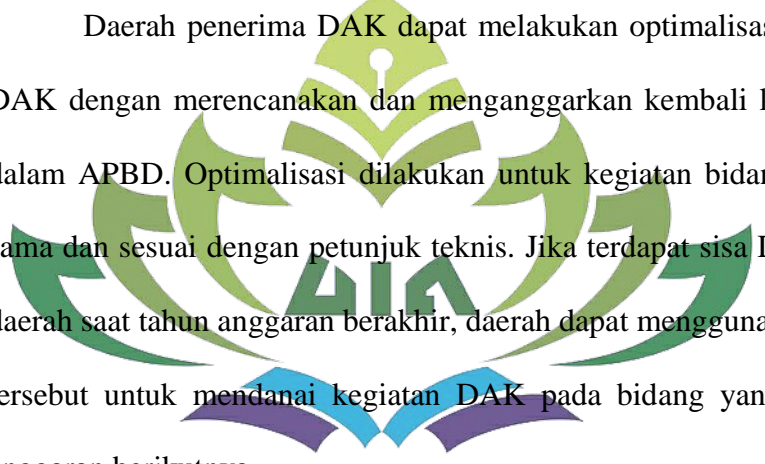
Dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta energi modern.

h. DAK bidang perumahan dan permukiman

Dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

i. DAK bidang keselamatan transportasi darat

Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fasilitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.²³



Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya.

Contoh pengalokasian DAK di Kabupaten Lampung Selatan berupa pengembangan sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di dua tempat yaitu TPI Kalianda dan TPI Rangan Tri Tunggal di Kecamatan Katibung. Pengembangan sarana dan prasarana di dua TPI tersebut merupakan salah satu upaya Dinas Kelautan Lamsel dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah daerah khususnya dibidang kelautan, dikutip:

²³www.djpk.depkeu.go.id, diunduh pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.00

“KALIANDA – Dua Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Lampung Selatan tahun ini mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana. Dua TPI itu adalah TPI Kalianda dan TPI Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung.

Dua TPI yang dikembangkan itu menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017 senilai Rp1,8 Milyar.

Kepala Dinas Kelautan Lamsel Dwi Jatmiko mengatakan, pengembangan sarana dan prasarana di dua TPI tersebut merupakan salah satu upaya Dinas Kelautan Lamsel dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah daerah khususnya dibidang kelautan.”²⁴

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri.²⁵ Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.²⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imas Sherli Febriana, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan kabupaten/kota yang murni digali oleh daerah. Besar kecilnya

²⁴www.radarlamsel.com/dua-tpi-di-lamsel-dapat-dak-rp18-milyar, diunduh pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.00

²⁵BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.5.

²⁶Fahri Eka Oktora, *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal Accountability, Vol 2 No. 1 Juni 2013), h.4.

PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya, semakin besar PAD pada suatu daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan di masa yang akan datang peran PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan memengaruhi Pemerintah Daerah dalam merencanakan Belanja Modal daerah. Sejalan dengan PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal. Dalam hal ini untuk lingkup penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2012-2014 diperoleh hasil bahwa Belanja Modal pemerintah daerah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).²⁷

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah

²⁷Imas Sherli Febriana, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.9 2015), h.18-19.

tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah harus diarahkan pada usaha yang terus-menerus berlanjut agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam UU No. 32 Pasal 157 Tahun 2004 dan UU No. 33 Pasal 6 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.²⁸ Pajak daerah dapat

²⁸Ahmad Yani, *Op,Cit*, h.45.

dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.²⁹ Adapun jenis-jenis pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁰

Pengertian lain retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.³¹ Adapun jenis-jenis retribusi daerah antara lain,

²⁹BPS Provinsi Lampung, *Loc.Cit*, h.5.

³⁰Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.15.

³¹BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.6.

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.³²

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini antara lain yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian lembaga keuangan nonbank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.³³

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.³⁴

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, karena mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah dibidang tertentu.³⁵

Lain-lain pendapatan asli daerah didapatkan dari sumber-sumber berikut: Hasil penjualan barang milik daerah; Jasa giro;

³²Esti Purwaningsih, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008*, (Surakarta: 2011), h.36.

³³Nina Hartiningsih, Edyanus Herman Halim, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau*, (Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Vol VII No.2 Mei 2015), h.260.

³⁴Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: 2011), h.16.

³⁵BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.6.

Sumbangan pihak ketiga; Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah;³⁶ Pendapatan denda pajak; Pendapatan denda retribusi; Fasilitas sosial dan umum; Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; Pendapatan hasil eksekusitas jaminan.³⁷

F. Alokasi Belanja Daerah

Daerah mempunyai kewajiban kepada publik yang harus dipenuhi. Kewajiban itu dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan untuk melaksanakannya diperlukan pengeluaran daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

1. Jenis-Jenis Belanja

Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam

³⁶Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.88.

³⁷Ahmad Yani, *Op.Cit*, h.74.

bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.³⁸

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 belanja terdiri dari dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.³⁹ Belanja langsung adalah belanja yang mempunyai keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.⁴⁰

a. Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, adapun kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanjanya terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan,

³⁸ BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.8.

³⁹ Sony Kristianto, Sugeng Widodo, *Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (JIEP-Vol. 17 No. 1 Maret 2017), h.5.

⁴⁰ Rini Oktriniatmaja, *Op.Cit*, h.24.

digunakan untuk pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa saran mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pindah tugas, dan pemulangan pegawai.⁴¹

- 3) Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, maupun aset tetap lainnya.⁴² Nilai pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/belanja barang dan jasa.⁴³

⁴¹BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.10.

⁴²Rakhmawati Listyarani, *Op.Cit*, h.18-19.

⁴³BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.10-11.

Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

b. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai, adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- 2) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*)⁴⁴ berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 3) Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja Hibah, bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus yang harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

⁴⁴Rakhmawati Listyarani, *Op.Cit*, h.6.

- 5) Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang ataupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Belanja Bagi Hasil, dianggarkan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, dan juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnyasesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.
- 8) Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang sudah ditutup.⁴⁵

Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan sebagai contoh

⁴⁵*Ibid*, h.17-18.

belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Pada dasarnya alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, misalnya untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik. Dengan adanya pembangunan tersebut dapat mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis maupun nonbisnis.

G. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.⁴⁶ Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 2006 pasal 53, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan juga aset tetap lainnya.⁴⁷

⁴⁶Iswahyudin, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*, (Jurnal Katalogis, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 06 Juni 2016), h.154.

⁴⁷Tria Saskia Dama, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kota Bitung 2003-2013*, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 16 No. 03 Tahun 2016), h.396.

2. Jenis-Jenis Belanja Modal

Ada lima jenis belanja modal, antara lain yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan juga belanja modal fisik lainnya.

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengeluaran, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Yang dimaksud dengan belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, dan lain-lain termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan juga bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik dan Lainnya

Belanja modal fisik dan lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan dan pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan.⁴⁸

Dalam Anggaran Pemerintah Daerah, porsi alokasi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.⁴⁹ *Multiplier effect* menjelaskan bahwa suatu kegiatan akan memicu timbulnya kegiatan lain dimana semakin banyak kegiatan yang timbul maka semakin

⁴⁸Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h.69.

⁴⁹Sugiyanta, *Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*, (Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14 No.1 Juni 2016), h.20.

tinggi pula dinamisasi suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan pengembangan wilayah. Yang dimaksud *multiplier effect* disini adalah apabila belanja modal dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana maka akan banyak keuntungan yang di dapat. Semakin baik sarana dan prasarana di suatu daerah maka aktivitas dan kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan mudah sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan perekonomian di suatu daerah akan semakin membaik.

H. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, sebagai derivasi dari islam.⁵⁰ Munculnya ekonomi islam sejak agama islam dilahirkan. Ekonomi islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu melainkan bagian integral dari agama islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi.⁵¹

Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20.

⁵⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia/P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h.13.

⁵¹*Ibid*, h.16.

Berbagai ahli ekonomi Muslim mendefinisikan ekonomi islam dengan beragam pengertian. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi islam dari beberapa ekonom muslim:⁵²

a. Hazzanuzaman (1984) dan Metwally (1995)

Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak.

Dalam hal ini, ekonomi islam dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi islam belum didukung oleh praktik. Ekonomi islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi islam, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994)

Ekonomi islam merupakan representasi perilaku ekonom umat muslim untuk melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh. Dalam

⁵²*Ibid*, h.18.

hal ini, ekonomi islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonom setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma, nilai-nilai dasar islam, batasan ekonomi dan status hukum, aplikasi dan analisis sejarah.

c. Mannan (1993), Ahmad (1992), dan Khan (1994)

Ekonomi islam merupakan implementasi sistem etika islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar islam yang terkait dengan ekonomi. spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas kaum muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.⁵³

⁵³*Ibid*, h.19.

Dalam pondasi ekonomi islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar islami. Tujuan ekonomi islam adalah mencapai fahlah yang direalisasikan melalui optimalisasi masalah bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya tanggung jawab terhadap perekonomian. Tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri dalam islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam.

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Makroekonomi atau ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang

mempengaruhi banyak rumah tangga (*house hold*), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.⁵⁴

Adapun ekonomi mikro atau mikroekonomi merupakan ilmu yang menangani perilaku satuan-satuan ekonomi individual termasuk di dalamnya ada pengambilan keputusan dalam rangka mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya.

Dalam ilmu ekonomi modern dikenal prinsip ekonomi yang sekaligus merupakan falsafah kehidupan ekonomi yang menjadi keyakinan. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal.

Dalam aplikasinya prinsip ini hanya menghasilkan pola pikir untung dan rugi yang menghilangkan aspek nilai ketika hal tersebut dianggap menguntungkan. Oleh karena itu ekonomi modern diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi (*homo economicus*) yang selalu berorientasi pada kepuasan dan keuntungan material. Kemudian timbulah masalah ekonomi yang disebabkan oleh adanya kelangkaan (*scarcity*).⁵⁵

Berbeda dengan ekonomi konvensional, seorang muslim mempunyai tujuan hidup untuk mewujudkan *maslahah* dalam meraih

⁵⁴Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.12.

⁵⁵*Ibid*, h.13.

falah (*falah* diartikan sebagai kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan). *Falah* inilah yang selanjutnya menjadi tujuan akhir perilaku ekonomi muslim baik dari aspek dunia maupun aspek akhirat, baik dari aspek material maupun aspek spiritual. Sehingga kepuasan bukanlah menjadi segala-galanya dalam ekonomi, melainkan kepuasan akan diperoleh dari perilaku ekonomi muslim ketika terciptanya *maslahah* dan secara otomatis akan mencapai *falah*.

Ketika kebutuhan hidup yang seimbang dapat terpenuhi maka akan melahirkan apa yang disebut *maslahah*, yang diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia. Menurut As-Shathibi *Maslahah* terdiri dari 5 hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*).⁵⁶

3. Pendapatan/Penerimaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai salah satu ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karena itu tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik.

⁵⁶*Ibid*, h.14.

Nurul Huda menjelaskan, di dalam konsep islam pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* (fasilitas publik) dalam menjamin terpenuhinya fasilitas sosial.⁵⁷

Menurut pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik untuk rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Di dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan kebijakan fiskal dalam islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam yaitu menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi.⁵⁸

Pada masa islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan Adapun sumber-sumber pembiayaan negara pada zaman Rasullallah SAW, sebagai berikut:

1. Zakat

Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang islami adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik zakat yang

⁵⁷Nurul Huda, *dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2015),h.1.

⁵⁸*Ibid*, h.191.

meliputi delapan golongan, sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah (9):60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal pembangunan. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan perternakan, zakat perusahaan dan sebagainya. Ajaran islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya lengkap dengan tarifnya. Pemerintah dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nas umum yang ada dan pemahaman terhadap realita yang modern.⁶⁰

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2010), h.196

⁶⁰Lilik Rahmawati, *Sistem Kebijakan Islam Modern dan Islam*, (Volume 1, No. 1, Desember, Surabaya, 2016), hal.35.

2. *Kharraj*

Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal islam *kharaj* sebagai paja tanah yang dipungut dari non-Muslim ketika khaybar ditaklukan.

Kharaj adalah pajak terhadap tanah, apabila dikonversi ke Indonesia, ia dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan anantara sistem *kharaj* dan PBB adalah *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas dari tanah (land productivity), dan bukan berdasarkan zona seperti aturan sistem PBB (zona strategi). Besarnya *kharaj* ditentukan oleh tiga karateristik yaitu tanah atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.⁶¹

3. *Khums*

Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. *Khums* juga merupakan suatu sistem pajak yang proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentatara islam sebagai ghanimah setelah memenangkan peperangan. Persentase tertentu dari pendapatan sumber daya alam, barang tambang, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya juga dikategorikan *khumus*.⁶²

⁶¹Muh. Fudhail Rahman, *Sumber-Sumber Pendapatan Dalam Pengeluaran Negara Islam*, (Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013), h.246-247.

⁶²Lilik Rahmawati, *Op.Cit*, h.38.

4. Ghonimah

Ghonimah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil ghonimah secara khusus di atur dalam QS Al-Anfal ayat 41:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝٦٣﴾

Artinya: “Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami Turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas Segala sesuatu.

Ayat di atas menerangkan bahwa sebagian ghanimah harus dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dan musafir.⁶⁴

5. Fay'

Fay' merupakan sumber penerimaan bagi negara islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hasyr (59): 6-7:

⁶³Departemen Agama, *Op.Cit*, h.182

⁶⁴Isnaini ⁶⁴Lilik Rahmawati, *Op.Cit*, h.38.

⁶⁴Departemen Agama, *Op.Cit*, h 182

Harahap, Dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.242.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٥﴾
 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Dan apa saja dari harta rampasan (fay’) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda mereka), maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan fay’ di atur oleh Rasullullah, yaitu sebagai harta negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari ghanimah. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya.⁶⁶

⁶⁵ Departemen Agama, *Op.Cit*, h.546

⁶⁶ *Ibid*, h.242-243.

6 Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan kaum nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara islam. Jizyah dipungut dari orang-orang nonmuslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban membayar jizyah tersebut di atur dalam QS At-Taubah⁶⁷ (9):29 sebagai berikut:



Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."⁶⁹

⁶⁷Lilik Rahmawati, *Op.Cit*, h.37.

⁶⁸Departemen Agama, *Op.Cit*, h191

⁶⁹Isnaini Harahap, *Op.Cit*, h.243.

7 *Usyr*

Menurut ulama fiqih, *Usyr* memiliki dua makna, yaitu 10 persen dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan dan 10 persen diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa barang dagangan.⁷⁰ *Usyr* dibebankan atas volume perdagangan. Semakin besar volume perdagangan, semakin besar pula *usyr* yang harus dibayarkan. Besarnya tarif *usyr* dipengaruhi oleh:

- 1) Tarif yang dipungut oleh partner dagang
- 2) Kemampuan bayar (minimal volume perdagangan 200 dirham)
- 3) Besarnya jasa yang diberikan pemerintah.⁷¹

Dari beberapa sumber pendapatan atau penerimaan negara dalam masa kepemimpinan Rasulullah SAW yang masih diterapkan di Indonesia adalah zakat. Pelaksanaan pengumpulan dana zakat di Indonesia merupakan kegiatan masyarakat yang ingin membersihkan hartanya meskipun telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Demikian pula masalah wakaf yang merupakan salah satu instrumen ekonomi islam yang ternyata belum masak dalam kebijakan fiskal.⁷² Meskipun zakat tidak sepenuhnya diberdayakan di Indonesia dan bukan merupakan sumber pendapatan negara, akan tetapi penetapan zakat melalui lembaga swasta sudah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian

⁷⁰M Nur Rianto Al- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.266.

⁷¹*Ibid*, h.263.

⁷²Syaakir Soryan, *Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)*, (Hunafa: Jurnal Studi Keislaman), h.311.

juga dengan peran dan fungsi wakaf belum masuk dalam kebijakan fiskal, namun wakaf pun telah banyak membantu pemerintah dalam perputaran ekonomi di Indonesia.

4. Pengeluaran/Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam berpegang pada terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu, kebutuhan sekunder (*al hajjat, al kamaliyyah*), sesuai kadar kemampuannya. Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Kebutuhan pokok dalam syariat islam dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, dan papan. Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini adalah keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan rakyat harus secara merata didistribusikan kepada rakyat.

Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hasr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ^{٧٣}

Artinya: "Apa saja harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya."

Ayat diatas menjelaskan bahwa penggunaan fai' diatur oelh Rasulullah, yaitu sebagai harta rampasan negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga yang dipimpinnya. Sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta terkait kebijakan pengeluaran pemerintah dan pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran agama islam di pandu oleh kaidah-kaidah syariah.

⁷³ Departemen Agama, *Op.Cit*, h.546

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah.
- b. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan mudharrat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Kaidah *al-ghium bi al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
- d. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah islam yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas.⁷⁴

I. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah Andreas Marzel Palealu yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012”.⁷⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan secara simultan variabel DAK dan PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni, Ni Luh Gde Novitasari yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali”.⁷⁶ Hasil penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi

⁷⁴ Muhammad Fauzan, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab*, (Jurnal: Human Falah, Vol.4 No.1 Januari –Juni 2017), h.55.

⁷⁵ Andreas Marzel Palealu, *Pengaruh Dana ALokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*, (Jurnal EMBA, Vol 1 No 4 Desember 2013), h.1189.

⁷⁶ Desak Gede Yudi Atika Sari, dkk, *Loc.Cit*, h15.

belanja modal, sementara Pendapatan Asli Daerah dan sisa lebih pembayaran anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, Efda Krisnawati yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur”.⁷⁷ Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan penelitian secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ida Bagus Badjra, I Ketut Mustanda dan Nyoman Abundanti yang berjudul “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali”.⁷⁸ Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dana Perimbangan tidak berpengaruh

⁷⁷Diah Nurdiwaty, *Loc. Cit.*, h.15.

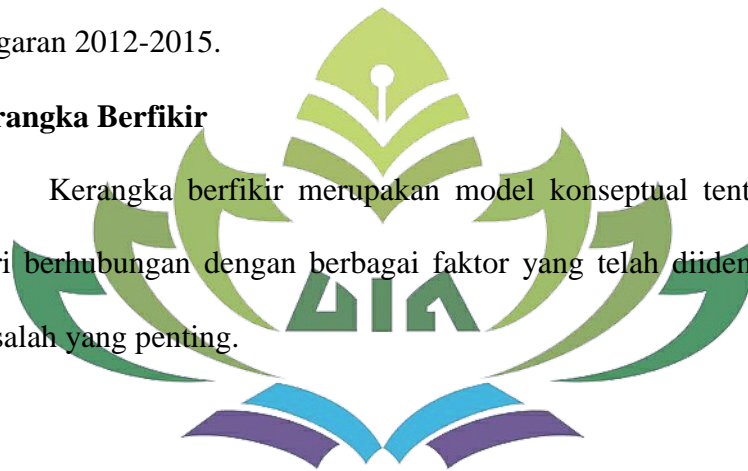
⁷⁸Ida Bagus Badjra, dkk, *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali*, (*Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol 6 No 1 Januari 2017), h.29.

positif signifikan terhadap belanja modal di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Winda Putri Lestari yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”.⁷⁹ Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2012-2015.

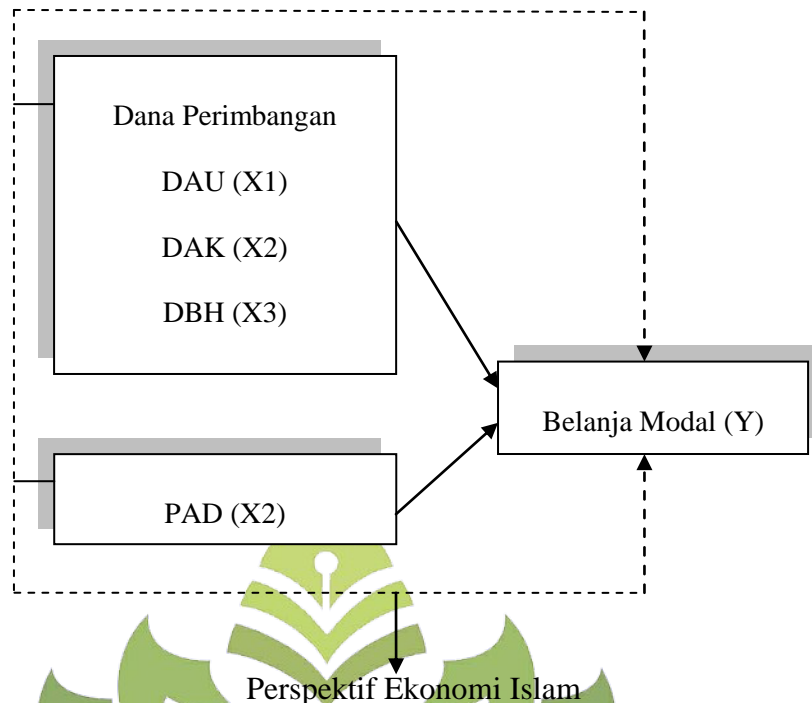
J. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



⁷⁹Winda Putri Lestari, *Pengaruh Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 6 No 6 Juni 2017)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



K. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru dan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁸⁰

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan

⁸⁰Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, April 2017), h.99.

masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.⁸¹

1. Pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja modal secara parsial.

Menurut teori keagenan, hubungan kontraktual antara *agen* (pemerintah daerah) dan *principal* (masyarakat) dalam konteks dana perimbangan dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja modal. Semakin besar pendapatan dana perimbangan dari provinsi maka semakin besar pula belanja modalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

⁸¹*Ibid*, h.106.

Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, Efda Kristinawati yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal di Jawa Timur”. Hasil penelitian secara parsial dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Selain itu hasil penelitian yang sejalan dilakukan oleh Maryam Nur Fajrina, dan Leny Suzan yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara positif terhadap terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal yang berjudul pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil Penelitian ini DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.⁸²

⁸²Maryam Nur Fajrina, Leny Suzan, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, (Vol.2 No.3 Desember 2015)

Bila dihubungkan dengan teori keagenan, hubungan kontraktual antara *agen* (Pemerintah Daerah) dan *principal* (masyarakat) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah (*agen*) bertanggung jawab kepada masyarakat (*principal*) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kaitan PAD dengan pengalokasian anggaran belanja modal yaitu sumber pembiayaan untuk anggaran pembangunan. PAD didapatkan dari iuran langsung masyarakat, seperti pajak, retribusi daerah, dan lain sebagainya.⁸³ Seperti penelitian yang dilakukan oleh Desak Gede Yudi Atika Sari yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

⁸³Winda Putri Lestari, *Op.Cit*, h.5.

Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali”. Hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.

Sehingga dari penjelasan teori di atas tentang hubungan antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah masing-masing terhadap belanja modal, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. H_{01} : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016.
- b. H_1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016.
- c. H_{02} : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016.
- d. H_2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016.
- e. H_{03} : Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan 2008-2016.
- f. H_3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan 2008-2016.
- g. H_{04} : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan 2008-2016.

h. H₄: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan 2008-2016.

2. Pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal secara simultan (bersama-sama).

Sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Peningkatan PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dari pemerintah ini yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004), dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiwaty, dkk yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur”. Hasil penelitian yang dilakukan secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad David Hermawan, dan Anwar Made Doni Whirsandono yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil dari penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal.⁸⁴

Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dan teori – teori yang sudah dijelaskan maka dapat dilihat hubungan antara variabel independen terhadap dependen sebagai berikut:

- a. H_{05} : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten lampung selatan tahun 2013-2017.
- b. H_5 : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan tahun 2013-2017.

⁸⁴Achmad David Hermawan, Anwar Made Doni Whirsandono, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, (Jurnal Riset Mahasiswa)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹ Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari katalog BPS dan nantinya diolah menggunakan alat analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung, ALFABETA. April 2017), h.11.

pengetahuan.²Sesuai dengan pengertian tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan berupa angka-angka baik secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun data kualitatif yang diolah menjadi kuantitatif. Data data kualitatif sendiri adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berbentuk fakta-fakta verbal atau hanya berupa keterangan saja. Data tersebut dapat menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan dinyatakan dalam satuan angka.³

Selain itu, dalam penelitian ini dimensi waktu data penelitian menggunakan data *time series*. *Time series* merupakan data yang disusun berdasarkan runtun waktu, seperti data harian, mingguan, bulanan atau tahunan.⁴Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa data realisasi APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016.

2. Sumber Data

²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.12.

³Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.118.

⁴Schochrul R. Ajija, et.al, *CaraCerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.1.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen.⁵Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.⁶

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga dapat diperoleh melalui internet.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, yaitu berupa laporan keuangan triwulan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.225.

⁶Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPEF Cetakan Keenam, 2014), h.147.

⁷Ibid, h.329.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah data dana perimbangan (DAU.DAK.DBH), laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan laporan realisasi belanja modal Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁹Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel 9 tahun yaitu 2008-2016.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *sampling purpose* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁰

E. Definisi Operasional Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan variabel yang akan menjadi topik dari penelitian. Variabel penelitian adalah suatu konstruk, atribut atau sifat atau nilai seseorang, obyek maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk kemudian dipelajari serta dicari informasinya

⁸ Sugiyono, *Op.Cit*, h.215

⁹ Ibid, h.81

¹⁰Sugiyono, *Op.Cit*, h.126.

dan ditarik kesimpulannya.¹¹ Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen.¹² Variabel terikat pada penelitian ini adalah laporan realisasi belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.¹³

2. Variabel independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun secara negatif. Jika terdapat variabel dependen maka harus terdapat variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu:

- a. Variabel X1 adalah laporan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lampung Selatan. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.58.

¹²Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: Lembaga Penerbit BPPFE, Edisi Pertama, 2002), h.63.

¹³Iswahyudin, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*, (Jurnal Katalogis, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 06 Juni 2016), h.154.

pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- b. Variabel X2 laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Selatan. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- c. Variabel X3 laporan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Lampung Selatan. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁴
- d. Variabel X4 adalah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, adapun definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian di ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Definisi	Skala Pengukuran
Independen (X)	1.Dana Alokasi Umum (X ₁) 2.Dana Alokasi Khusus (X ₂) 3.Dana Bagi Hasil	1.Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan	Rasio (Rp)

¹⁴BPS Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung*

¹⁵*Ibid*, h.5.

	(X ₃) 4. Pendapatan Asli Daerah/PAD (X ₄)	<p>untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat</p> <p>2. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus</p> <p>3. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi</p> <p>4. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Rasio (Rp)</p> <p>Rasio (Rp)</p> <p>Rasio (Rp)</p>
Dependen (Y)	Belanja Modal	Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat	Rasio (Rp)

		lebih dari satu periode akuntansi	
--	--	-----------------------------------	--

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam menganalisa ini, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkrit di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹⁶

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan *asosiatif* (hubungan) kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut.

Alat uji analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antar variabel dependen, lebih dari satu variabel independen.¹⁷ Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h.42.

¹⁷ Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), h.177

berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.¹⁸ Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis.

Ho: data residual berdistribusi normal

Ha: data residual tidak berdistribusi normal.

Artinya apabila nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$, menunjukkan data tersebut distribusinya tidak normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi jika nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ artinya data tersebut terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*) yang kuat atau tinggi.¹⁹ Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem *multikolineritas* (multiko) pada model regresi tersebut. Nilai Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan gejala

¹⁸Nor Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h.47.

multikolinieritas dengan melihat nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF(Varianse Inflation Factor) \geq 10$.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara variabel pengganggu pada periode t dengan pengganggu periode sebelumnya $(t-1)$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian, dapat dideteksi dengan menggunakan *uji durbin-watson*.

Uji durbin watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order outokorelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak adanya variabel lagi di antara variabel independen.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.²⁰

5. Uji Hipotesis

a. Uji T atau Uji Parsial

²⁰*Ibid*, h.58.

Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data.

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.²¹ Uji ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel

²¹ Wiratna Sujarmoni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.162

dependent. Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi (*R square*) yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.

7. Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).²²

Dimana:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 \dots + b_k.X_k + e$$

Keterangan:

Y : Belanja Modal

a : Bilangan Konstanta (nilai Y, apabila $X_1, X_2, X_3 \dots + X_k = 0$)

X_1 : Dana Alokasi Umum (DAU)

X_2 : Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_3 : Dana Bagi Hasil (DBH)

X_4 : Pendapatan Asli Daerah

²²Usman, Husaini, dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003), h.241.

X_5 : *Size*

b : Koefisien Regresi

e : error



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Lampung Selatan

Sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan sangat erat kaitanya dengan dasar pokok Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, pada bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara dan Hak-hak Asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sebagai realisasi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, lahirlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1945. Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan Komite Nasional.

Daerah, yang pada hakekatnya adalah Undang-undang Pemerintah di Daerah yang pertama. Isinya antara lain mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Daerah kepada aparat berwenang yaitu pamong praja dan polisi. Selain itu, untuk menegakkan pemerintahan di daerah yang rasional dengan mengikut sertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat. Selanjutnya disusul dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam wilayah Republik Indonesia yang susunan tingkatanya sebagai berikut :

1. Propinsi Daerah Tingkat I
2. Kabupaten/Kotamadya (Kota Besar) Daerah Tingkat II

3. Desa (Kota Kecil) Daerah Tingkat III

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, maka lahirilah propinsi Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 3 tanggal 14 Agustus 1950, yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah untuk Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 1950 tentang Pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera Selatan. Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian otonomi kepada Daerah bawahannya, diatur selanjutnya dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sebanyak 14 Kabupaten, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan beserta DPRD-nya dan 7 (Tujuh) buah Dinas Otonom.

Untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang struktur Pemerintahan Kabupaten, lahirilah Undang-undang nomor 1 tahun 1957 yang tidak jauh berbeda dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1948. Hanya dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1957 dikenal sebagai sistem otonomi riil yaitu pemberian otonomi termasuk medebewind. Kemudian untuk lebih sempurnanya sistem Pemerintahan Daerah, lahirilah Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang mencakup semua unsur-unsur progresif daripada :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957
4. Penpres Nomor 6 tahun 1959
5. Penpres Nomor 5 tahun 1960

Selanjutnya, karena Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka undang-undang Nomor 18 tahun 1965 ditinjau kembali. Sebagai penyempurnaan, lahirlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan d Daerah, yang sifatnya lebih luas dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1965. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang Pemerintahan saja, tetapi lebih luas dari itu, termasuk dinas-dinas vertikal (aparatur pusat di daerah) yang diatur pula di dalamnya. Selain itu, undang-undang Nomor 5 tahun 1974 diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang yang terakhir ini lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi riil dan seluas-luasnya, tetapi otonomi nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Lampung dan Ibukota Kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih

923.002 jiwa. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak diantara 1050 sampai dengan 105.0450 bujur timur dan 50150 sampai dengan 60 lintang selatan. Mengingat letak yang demikian ini Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis.

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang dimana Kapal-kapal dalam luar negeri dan merapat, secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung, terutama penduduk Lampung Selatan. Pelabuhan ini sejak 1982 termasuk dalam wilayah kota Bandar Lampung. Dibagian selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga ujung Pulau Sumatera terdapat sebuah pelabuhan penyebrangan Bakauheni, yang merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya.

Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera bagian selatan. Jarak antara pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 30 kilo meter dengan waktu tempuh kapal penyebrangan sekitar 1,5 jam. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109,74 km² (LSDA 2007) dengan kantor pusat pemerintahan.

3. Batas Wilayah

Secara administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara :Berbatasan dengan wilayah Lampung Tengah dan Lampung Timur

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Selat Sunda

Sebelah Barat :Berbatasan dengan kota Bandar Lampung dan Pesawaran

Sebelah Timur :Berbatasan dengan Laut Jawa

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau Krakatau, Pulau Sibesi, Pulau Sebuku, Pulau Legundi, Pulau Siuncal, Pulau Rimau dan Pulau Kandang. Bila ditinjau dari segi luas dan keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang. Secara topografis wilayah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu, wilayah dengan relatif datar yang sebagian besar berada disepanjang pesisir, wilayah berbukit dan gunung yang merupakan wilayah pegunungan Rajabasa.

B. Gambaran Hasil Penelitian

1. Dana Alokasi Umum di Kabupaten Lampung Selatan

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Penerimaan Dana Alokasi Umum setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga menjadikan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal (BM) Hal itu dikarenakan masih banyak daerah yang membutuhkan

DAU yang digunakan untuk menutup celah fiskal. Berikut tabel 4.1 penerimaan DAU tahun 2008-2016:

Tabel 4.1
Penerimaan DAU Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	DAU
1	2008	658,04
2	2009	444,67
3	2010	505,87
4	2011	574,12
5	2012	686,43
6	2013	769,87
7	2014	847,66
8	2015	881,98
9	2016	1031,44

Sumber: Data BPS Kabupaten Lampung Selatan

Dalam teori *agency*, Dana Alokasi Umum bertindak sebagai *principal* dan Dana Belanja Modal bertindak sebagai *agen*. Dalam hal ini, DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat membantu keuangan pemerintah daerah yang akhirnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk belanja daerah. Salah satunya untuk menutup celah fiskal suatu daerah (*fiscal gap*).

2. Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Lampung Selatan

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi

kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing. Artinya DAK memiliki kaitan erat dengan belanja pembangunan daerah. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup. Anggaran penerimaan DAK di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Penerimaan DAK Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016
(Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	DAK
1	2008	77,82
2	2009	77,31
3	2010	71,31
4	2011	75,44
5	2012	115,55
6	2013	77,18
7	2014	96,47
8	2015	108,84
9	2016	307,02

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan tabel 4.3 Menyatakan bahwa penerimaan data DAK pada tahun 2008-2016 mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 jumlah penerimaan DAK sebesar 77,82 dan pada tahun 2016 naik sebesar 307,02 meskipun penerimaan DAK ini mengalami fluktuatif hal itu tetap berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

3. Dana Bagi Hasil di Kabupaten Lampung Selatan

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana

Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak. DBH merupakan sumber sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Berikut ini data DBH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
Penerimaan DBH Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	DBH
1	2008	70,70
2	2009	41,94
3	2010	52,82
4	2011	50,81
5	2012	55,50
6	2013	53,84
7	2014	49,2
8	2015	33,77
9	2016	33,96

Sumber: BPS Kabputen Lampung Selatan

Berdasarkan tabel di atas penerimaan DBH Kabupaten Lampung Selatan mengalami kenaikan yang berfluktuatif. Penerimaan DBH tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 70,70 miliar rupiah. Sedangkan penerimaan DBH yang paling terendah terjadi pada tahun 2015. Penyebab naik turunnya alokasi DBH di kabupaten Lampung Selatan karena penerimaan DBH Pajak dan DBH nonpajak mengalami fluktuatif.

4. Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

Berikut data penerimaan PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 pada tabel 4.4:

Tabel 4.4
Penerimaan PAD Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2008-2016 (miliar rupiah)

Tahun	PAD
2008	25,10
2009	25,03
2010	40,75
2011	68,65
2012	80,46
2013	100,05

2014	132,17
2015	161,65
2016	184,06

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan data penerimaan PAD di setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun alokasi dari pendapatan daerah ini hanya sedikit yang dialokasikan ke belanja daerah (BM).Sebagian pengalokasian banyak digunakan untuk belanja pegawai yang ada di belanja langsung dan tidak langsung dan belanja lainnya.

5. Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.

Secara teoritis, indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan belanja adalah pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.Belanja modal ditambah dengan belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri.Oleh karena itu, semakin besar nilai belanja modal serta belanja barang dan jasa semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (DJPK, 2011).Penentuan besarnya anggaran belanja modal membuat pemerintah daerah mempunyai

peranan yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Belanja modal merupakan investasi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur publik sehingga dapat membantu pemanfaatan potensi wilayah dan pengembangannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah provinsi Lampung melalui belanja modal juga berusaha untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana publik seperti pembangunan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan, pembangunan jalan guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, balai kesehatan, dll. Anggaran belanja modal Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 (Miliar Rupiah)

Tahun	Belanja Modal
2008	142,95
2009	119,69
2010	79,40
2011	114,53
2012	275,42
2013	225,13
2014	206,06
2015	342,44
2016	470,12

*Su
mber:
BPS*

Lampung Selatan

Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa belanja modal mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Penerimaan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 470,12 dan terendah di tahun 2010 sebesar 79,40.

C. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini di lakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data dari variabel – variabel yang digunakan berdistribusi normal.

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas menggunakan uji SPSS 17.0 :

Tabel 4.6
Uji Normalitas

Sampel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
108	1,499	0,622	Normal

Sumber : data sekunder yang diolah, 2018

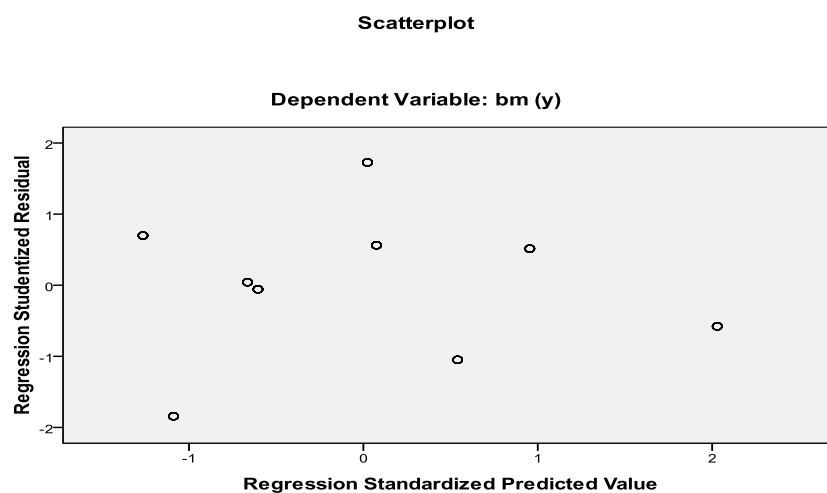
Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan model *Kolmogorov Smirnov Z* menunjukkan angka sebesar 1,499 dan nilai signifikansi yang ditunjukkan sebesar 0,622. Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi data dari uji normalitas diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,622 nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ artinya bahwa data variabel independen berasal dari data yang berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *Variance* dan *Residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi homoskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar

scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data yang mengumpul hanya pada diatas atau dibawah saja, penyebaran data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas



Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik – titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik – titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik – titik data tidak berpola, maka dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolineritas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Nilai *Cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan

gelaja multikolineritas dengan melihat nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Hasil uji multikolineritas pada penelitian ini ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Uji Multikolineritas

variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
DAU	0,146	1,779	Tidak terjadi multikolineritas
DAK	0,336	1,978	Tidak terjadi multikolineritas
DBH	0,410	1,438	Tidak terjadi multikolineritas
PAD	0,160	1,262	Tidak terjadi multikolineritas

Sumber : data sekunder yang diolah, 2018

Hasil uji multikolineritas ditunjukkan oleh tabel 4.8 dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Penelitian ini menggunakan variabel DAU, DAK, DBH, PAD. Nilai VIF dari variabel independen DAU sebesar 1,779, DAK sebesar 1,978, DBH sebesar 1,438, dan PAD sebesar 1,262, nilai tersebut lebih kecil dari 10. Maka dikatakan bahwa tidak terdapat multikolineritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya $(t-1)$. Penelitian ini menggunakan model regresi dengan uji *Durbin Watson*. Hasil perhitungan *Durbin Watson* (d) dibandingkan dengan nilai tabel d pada $\alpha = 0,05$, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas bawah (dU). Jika $d < dL$ dan apabila $d > 4 - dL$ maka terdapat autokorelasi. Jika $dU < d < 4 - dU$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji *Durbin Watson* ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

Sampel	Durbin-Watson	Keterangan
108	1,897	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : data sekunder yang diolah, 2018

Hasil uji autokorelasi dengan model *durbin Watson* menunjukkan angka d sebesar 1,897, sementara jumlah data (n) pada penelitian ini berjumlah 108 maka nilai batas atas (dL) sebesar 1,6104 dan nilai batas bawah (dU) sebesar 1,7367. Berdasarkan ketentuan uji *durbin Watson* bahwa data dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4 - dU$, maka hasil ini menunjukkan $1,7367 < 1,897 < 2,2633$ yang artinya dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

D. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model pengujian regresi berganda merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap Belanja Modal. Adapun hasil yang ditunjukkan dari uji regresi berganda pada variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Ringkasan Uji Regresi Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien	t_{hitung}	Signifikansi	Kesimpulan
(Constant)		6,573	2,658	0,009	
BM					
DAU	Positif	1,199	6,219	0,000	Berpengaruh
DAK	Positif	0,327	4,271	0,000	Berpengaruh
DBH	Negatif	-0,280	- 2,093	0,039	Berpengaruh
PAD	Positif	0,052	7,68	0,444	Tidak

					berpengaruh
Fhitung	=	162,239			
Signifikansi	=	0,000			
Adjusted R ²	=	0,858			
R Square	=	0,8630			

Sumber :data sekunder yang diolah, 2018

Hasil persamaan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.10 berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian ini maka persamaan regresi yang diperoleh adalah :

$$\text{Belanja Modal} = 6,573 + 1,199\text{DAU} + 0,327\text{DAK} - 0,280\text{DBH} + 0,052\text{PAD}$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 6,573 menyatakan bahwa jika variabel DAU, DAK, DBH dan PAD dianggap konstan, maka rata-rata alokasi Belanja Modal adalah sebesar 6,573. Sementara itu, dari hasil regresi tersebut menunjukkan :

- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal dikarenakan nilai signifikan DAU, DAK, dan DBH sebesar 0,000, 0,000, dan 0,039 lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Sementara PAD memiliki nilai signifikan sebesar 0,444 , artinya hanya variabel PAD yang tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- Koefisien regresi DAU sebesar 1,199 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai DAU, maka secara rata-rata, belanja modal akan meningkat sebesar 119,9%.

- c. Koefisien regresi DAK sebesar 0,327 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai DAK, maka secara rata-rata, belanja modal akan meningkat sebesar 32,70%.
- d. Koefisien regresi DBH sebesar -0,280 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai DBH, maka secara rata-rata, belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 28%.

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi – variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel – variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted* R^2 untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau *Adjusted* R^2 diperoleh nilai sebesar 0,858 atau 85,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 85,80% variasi Belanja Modal (BM) dapat dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan

sisanya ($100\% - 85,80\% = 14,20\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel independen. Berdasarkan uji ANOVA atau uji F yang dilakukan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel Belanja Modal (BM), didapat nilai F_{hitung} sebesar 162,239 dengan signifikansi 0,000.

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ itu artinya nilai signifikansi uji F jauh lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal, atau dengan kata lain DAU, DAK, DBH, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel Belanja Modal (BM).

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah jika nilai signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ (5%), maka H_0 dapat ditolak dengan demikian H_a dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen :

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Hasil uji t pada tabel 4.6 diatas untuk variabel DAU terhadap Belanja Modal (BM), menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 1,199. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) dari variabel Dana Alokasi Umum yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal diterima.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil uji t pada tabel 4.6 diatas untuk variabel DAK terhadap Belanja Modal (BM), menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 0,327. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) dari variabel Dana Alokasi Khusus yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal diterima.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Hasil uji t pada tabel 4.6 diatas untuk variabel DBH terhadap Belanja Modal (BM), menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai negatif yakni sebesar -0,280. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H3) dari variabel Dana Bagi Hasil yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal diterima.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji t pada tabel 4.6 diatas untuk variabel PAD terhadap Belanja Modal (BM), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 5% yaitu sebesar 0,444, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 0,052. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H₄) dari variabel Pendapatan Asli Daerah yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal diterima.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan secara Parsial

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan

Hasil uji secara parsial antara DAU terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang dimiliki DAU lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,000, sedangkan koefisien regresi dari DAU bernilai positif yakni sebesar 1,199. Artinya bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Berikut data realisasi DAU Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016:

Tabel 4.10
Penerimaan DAU Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	DAU
1	2008	658,04
2	2009	444,67
3	2010	505,87
4	2011	574,12
5	2012	686,43
6	2013	769,87
7	2014	847,66
8	2015	881,98
9	2016	1031,44

Sumber: Data BPS Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa setiap tahunnya Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung mengalami fluktuatif. Dana Alokasi Umum 9 tahun terakhir tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar 1031,44 dan terendah terjadi di tahun 2009 sebesar 444,67. Peningkatan DAU disebabkan oleh peningkatan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Kesenjangan

fiskal (*fiscal gap*) merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal, dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer Pemerintah Pusat.

Bila dikaitkan dengan teori keagenan, hubungan kontraktual antara principal dan agen terlihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah menutup kesenjangan fiskal di daerah kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan Dana Alokasi Umum. Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai. Tujuan dari ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangun, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Semakin tingginya tingkat Dana Alokasi Umum dikarenakan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengandalkan dana alokasi umum untuk menutup kesenjangan fiskal(*fiscal gap*). Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah kebutuhan, dijelaskan bahwa kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU di suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah.

Fiscal gap inilah yang seyogyanya ditutup oleh DAU, karena dengan demikian pemerataan (dalam arti setiap daerah bisa membiayai setiap kebutuhan dasar wilayahnya) dapat terpenuhi. Tentu saja disini asumsinya adalah bahwa pengukuran atau perkiraan mengenai potensi dan

kebutuhan masing-masing daerah sudah dilakukan secara cermat. Jadi hubungan antara kapasitas dengan kebutuhan daerah yang menjadi dasar perumusan DAU tersebut harus jelas. Sebab, secara umum semestinya mudah dimengerti bahwa daerah-daerah yang relatif sudah (lebih) maju cenderung mampu untuk berdiri sendiri, sehingga hanya sedikit saja bantuan pusat yang diperlukan.

Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Tria Saskia Dama, Paul David, dan Inggriani Elim (2016) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan, dapat diartikan bahwa jika proporsi DAU pemerintah daerah apabila semakin ditingkatkan oleh pemerintah pusat, maka alokasi belanja modal akan meningkat.

b. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan

Hasil uji secara parsial antara pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal di kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang dimiliki DAK lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,000, sedangkan koefisien regresi dari DAK bernilai positif yakni sebesar 0,237. Artinya bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Anggaran penerimaan DAK di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.11
Penerimaan DAK Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	DAK
1	2008	77,82
2	2009	77,31
3	2010	71,31
4	2011	75,44
5	2012	115,55
6	2013	77,18
7	2014	96,47
8	2015	108,84
9	2016	307,02

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan tabel 4.12 Menyatakan bahwa penerimaan data DAK pada tahun 2008 – 2016 mengalami fluktuatif. Penerimaan DAK tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 307,02 dan terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 71,31. DAK memiliki kaitan erat dengan belanja pembangunan daerah. Perbedaan letak geografis dan kekayaan sumber daya yang dimiliki daerah kabupaten Lampung Selatan menyebabkan perbedaan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan, dan setiap tahun terjadi perubahan dalam alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Bila disesuaikan dengan teori keagenan antara *agen* (masyarakat) dan *principal* (pemerintah) dalam konteks Dana Alokasi Khusus dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Salah satu contoh pengalokasian DAK di Kabupaten Lampung Selatan berupa pengembangan sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di dua tempat yaitu TPI

Kalianda dan TPI Rangan Tri Tunggal di Kecamatan Katibung. Pengembangan sarana dan prasarana di dua TPI tersebut merupakan salah satu upaya Dinas Kelautan Lamsel dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah daerah khususnya dibidang kelautan.

Pengeluaran DAK hampir sebagian besar dialokasikan untuk alokasi belanja modal, hal ini karena DAK dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Oleh sebab itu DAK sangat mempengaruhi peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Penggunaan DAK dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik dibidang pendidikan, kesehatan sosial, maupun pelayanan umum.

Sesuai dengan UU No.33/2004 pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria yaitu, kriteria umum berdasarkan indeks fiskal netto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013), yang membuktikan bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK.

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan

Hasil uji secara parsial antara DBH terhadap alokasi belanja modal di kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang dimiliki DAU lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,039, sedangkan koefisien regresi dari DBH bernilai positif yakni sebesar -0,280. Artinya bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Data DBH kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel 4.13:

Tabel 4.12
Penerimaan DBH Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2008-2016 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	DBH
1	2008	70,70
2	2009	41,94
3	2010	52,82
4	2011	50,81
5	2012	55,50
6	2013	53,84
7	2014	49,2
8	2015	33,77
9	2016	33,96

Sumber: BPS Kabputen Lampung Selatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa DBH mengalami fluktuatif. Dana bagi hasil tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 70,70 miliar rupiah dan terendah pada tahun 2015 sebesar 33,77 miliar rupiah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran dan belanja daerah termasuk belanja modal. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan kurang memanfaatkan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pariwisata yang kurang dikenal oleh masyarakat luar daerah dan mancanegara.

Sesuai dengan teori keagenan antara *principal* (pemerintah) dan *agen* (masyarakat). Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan dana transfer dalam bentuk Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. DBH merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal

dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Salah satu daerah di Kabupten Lampung Selatan yang mendapat alokasi DBH adalah Kecamatan Jati Agung sebesar kurang lebih 71,55 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu tujuan peningkatan DBH tersebut adalah untuk perbaikan infrastruktur jalan.

Investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil yang positif agar pemerintah daerah lebih mandiri dan dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi belanja daerah agar tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam hal membiayai pengeluaran dan belanja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlina Tiara Intan Sari yang berjudul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur hasil uji yang diperoleh nilai t-hitung Dana Bagi Hasil sebesar -2,255 dengan signifikansi 0,026 yang berarti bahwa variabel independen DBH secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Hal ini terjadi karena penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam dan dana bagi hasil pajak relatif kecil. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih belum optimal dalam menggali potensi pajak dan sumber daya alam yang ada.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan

Hasil uji secara parsial antara PAD terhadap alokasi belanja modal di kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang dimiliki PAD lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,444, sedangkan koefisien regresi dari PAD bernilai positif yakni sebesar 0,052. Artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Hasil pengujian statistik t menyebutkan nilai koefisien PAD 0,056 dan tingkat signifikansinya 0,602 dimana tingkat signifikansi ini jauh lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung (0,524) lebih kecil dari nilai t tabel (1,98) sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai Belanja Modal.

Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puput Purpitasari, yang menyatakan t hitung PAD

menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikan 0,000 atau dibawah $\alpha = 5\%$ artinya bahwa hipotesis H1 dapat diterima, bahwa pengalokasian anggaran belanja daerah dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat Belanja Daerah di kabupaten/kota tersebut, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah pula tingkat Belanja Daerahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah nya maka semakin tinggi pula Belanja Daerahnya.

Menurut Rudy Badrudin, jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan (belanja modal) lebih besar daripada anggaran pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini tidak berlaku dengan kondisi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, karena belanja yang dikeluarkan hanya sebagian yang dialokasikan ke belanja modal dan sisanya digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa guna menunjang tugas dan memperlancar tugas, kerja dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sumber lain yang

menunjukkan realisasi pengeluaran atau belanja langsung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Realisasi Pengeluaran Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 – 2016 (miliar rupiah)

Tahun	BM	BP	BBJ
2009	119,690	396,418	54,183
2010	79,402	478,714	72,761
2011	141,534	553,247	152,613
2012	275,416	573,426	162,880
2013	225,13	683,10	163,78
2014	206,06	760,60	214,90
2015	342,44	850,69	215,75
2016	470,122	891,302	260,176

Sumber: BPS Lampung Selatan

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan tinjauan keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu 2008 – 2016, realisasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dibandingkan untuk membiayai belanja modal. Seharusnya pemerintah daerah lebih memprioritaskan pengeluaran untuk penambahan aset tetap atau barang publik, karena daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan secara Simultan

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.

Berdasarkan hasil uji signifikansi secara simultan (uji F) menyatakan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 162,329 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya bahwa variabel DAU, DAK, DBH dan PAD secara bersamaan mempengaruhi alokasi belanja modal di Kabupaten Lampung Selatan. Sementara hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R²* diperoleh nilai sebesar 0,858 atau 85,80% yang berarti nilai 85,80% variasi Alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya 14,20% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan jumlah penduduk.

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu

menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah dan untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari Dana Perimbangan ini menyerupai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah Belanja Modal. Meskipun Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada Dana Perimbangan dalam mendanai kebutuhan Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan

untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan, dan mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Menurut Metwally, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip “Kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja”. prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan.

Sesuai dengan prinsip tersebut pemerintah dalam mengelola penerimaan yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah dengan sebaik mungkin mengelola dana tersebut. Dana perimbangan di Kabupaten Lampung Selatan sudah terealisasi dengan baik, pada tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun lebih dengan realisasi sekitar 98,42 %. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, target yang ditetapkan sebesar Rp 406 miliar lebih dengan realisasi mencapai 100,62 %.

Pendistribusian dana perimbangan yang terdiri DAU, DAK dan DBH sudah efektif. Sebagai contoh pengalokasian DAK di dua tempat pelelangan ikan, yaitu TPI Kalianda dan TPI Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung dalam rangka mendukung percepatan

pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan di bidang perikanan. Selain DAK, Dana Alokasi Umum telah memberikan kontribusi yang baik. Salah satu program dari pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah program Satu Desa Satu Milyar. Pemberian dana ini bertujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Seperti firman Allah dalam Sesuai dengan Allah berfirman dalam QS Al-Hasyr ayat 7:

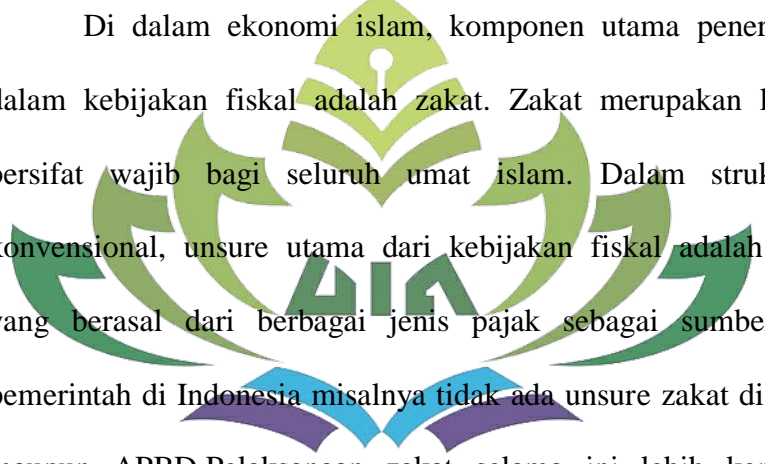
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa harta janga hanya beredar di antara orang-orang kaya saja melainkan kekayaan didistribusikan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.”¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan *faqh* diatur oleh Rasulullah, yaitu sebagaimana harta negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima

¹ Departemen Agama, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro) h. 546

dari penggunaan ghanimah. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya. Agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja melainkan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat luas. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pungutan pajak tidak terlalu optimal di dalam belanja modal dikarenakan jumlah PAD tidak semua disalurkan untuk membiayai belanja modal.



Di dalam ekonomi islam, komponen utama penerimaan negara dalam kebijakan fiskal adalah zakat. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat islam. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsure utama dari kebijakan fiskal adalah unsure-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah di Indonesia misalnya tidak ada unsure zakat di dalam APBN maupun APBD. Pelaksanaan zakat selama ini lebih kepada kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya.

Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat. Hal ini yang membedakan kebijakan fiskal dalam islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Seperti firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lahi maha mengetahui.”

Maksud dari ayat diatas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda, dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati mereka dan juga memperkembangkan harta benda mereka.

Hal ini menunjukkan sangat pentingnya zakat dalam islam karena salah satu arti dari kata zakat adalah “berkembang”. Kalau pada saat ini dampaknya terhadap ekonomi masi kecil, ini tentunya disebabkan karena beberapa hal. Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Tetapi belum optimal. Oleh karena itu diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat tersebut seperti sedekah, dan wakaf sehingga dampaknya terhadap distribusi menjadi optimal. Selain itu dampak ekonomi zakat masih kecil karena zakat selama ini belum dikelola dengan baik dan profesional disamping masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kegiatan lembaga zakat ini pada masyarakat dengan dukungan usaha-usaha untuk mengelola kegiatan zakat dengan baik.

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran dan pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam alokasi belanja berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan belanja modal, yang secara tidak langsung sejalan dengan tujuan pembangunan dalam ekonomi islam itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”²

Pengeluaran haruslah ditujukan untuk hal-hal yang jelas bermanfaat dan hemat, tidak boros dan islam tidak memperbolehkan penimbunan harta karena dengan penimbunan itu, kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Selain itu dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur antara pendapatan dan pengeluaran yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus lebih mengelola sumber daya yang ada dan sumber pembiayaannya melalui anggaran APBD ke pengeluaran yang lebih produktif untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

² Ibid, h.365

Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab (*responsibility*) sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Tanggung jawab yang dimaksud ialah bertanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu Allah SWT, terhadap diri sendiri dan masyarakat luas (*stakeholders*).Pertanggung jawaban berarti bahwa pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab moral kepada tuhan atas kewajibannya, harta yang menjadi milik orang banyak dalam islam adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan tuhan. Kemudian prinsip kebebasan, kebebasan apapun yang tanpa batasan pasti menuntut adanya pertanggung jawaban, untuk memenuhi keadilan, transparansi, kebenaran dan kehendak bebas dalam setiap tindakan pemerintah.

Dana perimbangan dalam islam merupakan implikasi dari konsep distribusi dalam sistem ekonomi islam, dimana kebijakan distribusi yang diajarkan islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak kepada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil, untuk memenuhi kebutuhan di tiap-tiap daerah atau kebutuhan dharuriyah masyarakat, dimana kebutuhan dharuriyah sendiri adalah kebutuhan yang paling utama atau penting. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nash*

(menjaga kehidupan/jiwa), *khifdu nash* (menjaga keturunan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu mal* (menjaga harta).

Tujuan yang bersifat *dharuri* adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia. Lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila kelima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan Pendapatan Asli Daerah di tinjau dalam perspektif ekonomi islam di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut:

1. Secara Parsial dari hasil uji signifikan (uji t) pada variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada tahun 2008-2016 karena peningkatan kesenjangan fiskal. Selanjutnya untuk variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal tahun 2008-2016 karena perbedaan letak geografis dan kekayaan sumber daya yang dimiliki sehingga menyebabkan DAK di Kabupaten Selatan mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pada tahun 2008-2016 karena pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kurang memanfaatkan potensi daerah yang ada. Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya..
2. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda, dapat dinyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan

pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable belanja modal pada tahun 2008-2016.

3. Dana perimbangan dalam islam merupakan implikasi dari konsep distribusi dalam sistem ekonomi islam, dimana kebijakan distribusi yang diajarkan islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan berdistribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak kepada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan dharuriyah masyarakat. Dimana kebutuhan dharuriyah itu sendiri adalah kebutuhan yang paling utama atau penting. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdunash* (menjaga kehidupan/jiwa), *khifdunash* (menjaga keturunan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu mal* (menjagaharta). Dalam menyusun anggaran sebaiknya selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, untuk menambah aset tetap yang dibiayai dari anggaran belanja modal. Sehingga pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan syariah dan penentuan skala prioritas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. Hal ini dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta pembuatan peraturan daerah yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di daerah. Alokasi dana perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBH seharusnya lebih diprioritaskan pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan public seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dana perimbangan dan PAD masih banyak digunakan untuk alokasi belanja lainnya yang kurang memberikan manfaat. Belanja modal yang dilakukan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik dan mampu memberikan *income* bagi daerah.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 9 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya serta

menambah tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

3. Untuk Publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan atau skala prioritas pembangunan fisik yang dianggarkan untuk belanja modal daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Schochrul R, et.al, *CaraCerdas Menguasai Eviews* Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Al-Arif M Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Atmaja Lukas Setia, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: ANDI, 2011
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus*, Jakarta
- Badjra, Ida Bagus, dkk, *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dan Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali*, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol 6 No 1 Januari 2017
- Badrudin Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012
- BPS Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung*, BPS Provinsi Lampung: 2016
- Dama, Tria Saskia, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kota Bitung 2003-2013*, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 16 No. 03 Tahun 2016
- Djaenuri Aries, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Fahri Eka Oktora, *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*, *Jurnal Accountability*, Vol 2 No. 1 Juni 2013
- Fajrina, Maryam Nur, Leny Suzan, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Vol.2 No.3 Desember 2015
- Fauzan Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab*, *Jurnal: Human Falah*, Vol.4 No.1 Januari –Juni 2017

Febriana Imas Sherli, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.9 2015

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: ANDI, 2002

Harahap, Isnaini, Dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Hartiningih, Nina, Edyanus Herman Halim, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau*, Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Vol VII No.2 Mei 2015

Hermawan, Achmad David, Anwar Made Doni Whirsandono, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, Jurnal Riset Mahasiswa

<http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/9K5YRwaK-dana-desa-kabupaten-lampung-selatan-capai-rp30-4-miliar>

<http://lampung.tribunnews.com/2018/02/07/tahun-ini-jati-agung-kebagiananalokasi-rp-7155-miliar>

<http://www.lampost.co/berita-infrastruktur-jalan-di-lampung-selatan-mengalami-peningkatan>

<https://www.radarlamsel.com/dua-tpi-di-lamsel-dapat-dak-rp18-milyar/>

Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1*, Prenada Media Group: Jakarta, 2015

Indriantoro Nur, Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* Yogyakarta: Lembaga Penerbit BPPFE, Edisi Pertama, 2002

Iswahyudin, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupatn/Kota di Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 06 Juni 2016

Juliansyah Nor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* Jakarta: PT. Grasindo, 2014

Kartono Kartini, *Pengantar Metode Research*, Bandung: Kencana 1998

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, www.djpk.depkeu.go.id

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, www.kemenkeu.go.id, Jakarta, (18 April 2018)

Kristianto, Sony, Sugeng Widodo, *Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa TImur Dalam Pengentasan Kemiskinan*, JIEP-Vol. 17 No. 1 Maret 2017

Kusamah, Deddy Supriyady Barat, Dadang Salihin, *Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Lestari Winda Putri, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol6 No.6 Juni 2017

Listyarani Rakhmawati, *Analisis Incrementalisme Anggaran Terhadap Revisi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Akuntansi, Lampung. Tahun 2016

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011

Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*, Jakarta

Nurdiwaty, Diah, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli 2017

Oktriniatmaja Rini, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*, Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011

Palealu Andreas Marzel, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*, Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013

Purpitasari Puput, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.11 Tahun 2015

Purwaningsih Esti, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008*, Surakarta: 2011

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia/P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014

Putra Ardhansyah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatra Utara*, Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen, Vol.3 No.1 November 2016

P3EI, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Rahman Muh. Fudhail, *Sumber-Sumber Pendapatan Dalam Pengeluaran Negara Islam*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013

Rahmawati Lilik, *Sistem Kebijakan Islam Modern dan Islam*, Volume 1, No. 1, Desember, Surabaya, 2016

Sari, Desak Gede Yudi Atika, dkk, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Dana Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali*, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol.9 No.1 Juli 2017

Salim, Peter, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers Jakarta, 1999

Soebachi Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Soryan Syaakir, *Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)*, Hunafa: Jurnal Studi Keislaman

Sugiyanta, *Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14 No.1 Juni 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006

Sujarweni V Wiranata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013

Tim Penerjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1995

Teguh Muhammad, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005

Usman, Husaini, Setiadi, *Pengantar Statistika*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003

Wandira Arbie Gugus, *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Februari 2013

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

